Wilayah Gerak Earth Hour Menjadi Sarana Pemerintah dan Swasta Meraih Dukungan Publik

Siva Yolla Mardiana

Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
yollasiva30@gmail.com

Abstract

The purpose of Earth Hour and the World Wide Fund for Nature (WWF) invite people around the world to continue to be a part of the social movement in the field of climate change with one of the energy-saving activities. In their campaign, Earth Hour proved to be a dominant force among other powers, associated with the three pillars of power, between political power and economic power. Environmental issues have become a global issue, a variety of damage that occurs on earth has become a serious concern by many. There are many organizations, communities and also mass movements that are concerned with environmental issues. Earth Hour is a global movement that initially campaigned energy savings with its peak event by turning off the electricity in 60 minutes at the end of March every year. Earth Hour movement spread over 153 countries around the world and 28 cities in Indonesia. The research was the focus in the area of motion Earth Hour; The Political environmental theory which was used in this research is Peterson's theory, those are the government, the private sector and social movement itself. This type of research is a qualitative study using a descriptive study. The researcher obtained data by conducting in personal experience and study literature. Data analysis techniques include data reduction, data display, and conclusion. The Conclusion of this study is in Earth Hour has its own characteristics to do such as lobbying to local authorities, then how to lobbying with other people who have the capability to influence public opinion, cooperate with other NGOs and raise social issues in the community to lobby with the private sector. In this area of movement Earth Hour is used as best as possible by the government and private sector to achieve their interests outside environmental related policy issues.

Keywords: *environmental politics, social movement, political power, economic power, public discourse.*

Abstrak

Tujuan Earth Hour dan World Wide Fund for Nature (WWF) mengundang orang di seluruh dunia untuk terus menjadi bagian dari gerakan sosial di bidang perubahan iklim dengan salah satu kegiatan penghematan energi. Dalam kampanye mereka, Earth Hour terbukti menjadi kekuatan dominan di antara kekuatan-kekuatan lain, yang terkait dengan tiga pilar kekuatan, antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Masalah lingkungan telah menjadi masalah global, berbagai kerusakan

yang terjadi di bumi telah menjadi perhatian serius banyak orang. Ada banyak organisasi, komunitas dan juga gerakan massa yang peduli dengan masalah lingkungan. Earth Hour adalah gerakan global yang awalnya mengkampanyekan penyempurnaan energi dengan acara puncaknya dengan mematikan listrik dalam 60 menit pada akhir Maret setiap tahun. Gerakan Earth Hour tersebar di 153 negara di seluruh dunia dan 28 kota di Indonesia. Penelitian ini fokus di bidang gerak Earth Hour; Teori lingkungan politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peterson, yaitu pemerintah, sektor swasta dan gerakan sosial itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif. Peneliti memperoleh data dengan melakukan pengalaman pribadi dan mempelajari literatur. Teknik analisis data meliputi reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di Earth Hour memiliki karakteristik tersendiri untuk melakukan seperti melobi pihak berwenang setempat, kemudian bagaimana melobi dengan orang lain yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, bekerja sama dengan LSM lain dan mengangkat masalah sosial di masyarakat untuk melobi dengan sektor swasta. Dalam bidang pergerakan ini Earth Hour digunakan sebaik mungkin oleh pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai kepentingan mereka di luar masalah kebijakan terkait lingkungan.

Kata Kunci: politik lingkungan, gerakan sosial, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, diskursus publik.

Pendahuluan

Gerakan sosial bukan merupakan suatu barang baru lagi dikalangan masyarakat Indonesia. Khususnya anak muda generasi dibawah era 90an yang hidup dan berkembang dengan gerakan sosial terbesar dalam sejarah Negara Indonesia untuk mencapai demokrasi yaitu, gerakan 1998. Di mana gerakan 1998 merupakan aksi mahasiswa turun kejalan dalam rangka mencapai tujuan utama untuk menuntut sang penguasa Soeharto untuk lengser dan diikuti dengan terjadinya perubahan kondisi Negara Indonesia menuju Negara demokrasi sepenuhnya. Semenjak gerakan ini di anggap monumental karena berhasil membawa perubahan sosial politik dalam kondisi demokrasi tanah air, tidak salah jika dikatakan semenjak inilah gerakan sosial di Indonesia menjadi suatu sikap yang semakin berkembang dan melebur secara baik dengan ben tuk kebudayaan politik yang ada di Indonesia.

Demokrasi yang terus berubah dan berkembang di Indonesia menyebabkan pergerakan masyarakat di Indonesia bukan hanya tentang politik dan Negara saja, hingga dewasa ini gerakan sosial di Indonesia bisa mem bicarakan dari hal umum seperti pendidikan, hingga urusan terkait pribadi seperti menyangkut kegiatan ranjang rumah tangga seseorang. Perubahan yang dilakukan gerakan sosial terbukti ampuh dalam menentukan jalur pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan atau suatu keputusan. Pada tulisan ini akan dengan fokus membahas tentang pergerakan yang dilakukan oleh *nonprofit organization* yaitu Earth Hour. Earth Hour sendiri merupakan sebuah gerakan sukarela lingkungan yang pertama kali diinisiasikan di Sydney, Australia pada tahun 2007 oleh kerjasama antara WWF, Fairfax Media dan Leo Burnett. Kampanye ini dilaksanakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Sydney. Saat itu, lebih dari 2,2 juta orang dan 2.000 bisnis (perkantoran) melakukan pemadaman (*switch off*) lampu dan barang elektronik lainnya secara serentak selama satu jam,

mulai dari pukul 20.30-21.30 waktu setempat. Tahun-tahun berikutnya, Earth Hour, dibawah naungan WWF, terus berkembang sebagai kampanye global yang terkonsentrasi pada bidang gaya hidup hemat energi dan ramah lingkungan untuk mencegah perubahan iklim. Selebrasi *switch off* dilaksanakan pada Sabtu terakhir di bulan Maret setiap bulannya.

Hingga saat ini, WWF Indonesia terus berupaya mengembangkan kampanye Earth Hour, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Kalimantan hingga Papua. Dimana kota-kota besar seperti Jakarta merupakan konsumen akses listrik dengan kapasitas sangat besar. Selain melakukan kampanye secara langsung, Pada tahun 2011 kampanye *online* Earth Hour Indonesia berhasil menjadi kampanye terbesar di dunia, setelah Brazil dan Amerika. Pada tahun 2015, lebih dari 40 kota dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam selebrasi dan didukung oleh komitmen dari berbagai *public figure* lokal dan nasional. Dalam pelaksanaan Earth Hour, komunitas atau organisasi ini mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari sesama komunitas, pelajar, mahasiswa, rumah tangga, pemerintah, media massa hingga bisnis dan korporasi untuk bersamasama ber sinergis menjalankan aksi. Aksi Earth Hour sendiri tidak hanya sekedar mematikan belaka, tetapi juga menjadi gerakan perubahan bersama untuk bumi yang lebih lestari. Selain *switch off* selama selebrasi, perubahan yang juga diharapkan terwujud pada sektor lingkungan lain seperti penggunaan moda transportasi publik, daur ulang sampah, hemat kertas dan penggunaan penggunaan plastik sebagai gaya hidup bijak lingkungan.

Kerangka Teori

(Peterson, 2000; Bryant, 1992; Vayda, 1983; Blaikie dan Brookfield, 1987; Abe Kenichi, 2003) mengemukakan definisi yang berbeda tentang Politik Lingkungan. Dimana Peterson sendiri mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tenses yang dinamis antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. (Herman, Hidayat, 2011: 9). Ilmu lain mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem (Hikmawan & Hidayat, 2016). Konsep ini telah diangkat dalam cara yang beraneka seperti “Dunia Ketiga Politik Lingkungan”, politik lingkungan boleh didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Pemahaman terkini politik lingkungan adalah cenderung untuk melihat mendalam dinamika lingkungan dan memfokuskan atas suatu susunan sistem manusia. Abe Kenichi mendefinisikan politik lingkungan sebagai suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk secara kritis menganalisis masalah ketepatan sumber daya alam dan asal usul kerusakan sumberdaya secara politik ekonomi (Hikmawan & Hidayat, 2016), dengan maksud itu diperoleh studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis. Dalam pengertian lain politik lingkungan peduli pada dimensi politik dalam penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Jelaslah, bahwa lingkup dari politik lingkungan telah merujuk sebagai suatu metode analisis daripada disiplin ilmu pengetahuan yang menyatu atau subdisiplin, yang biasanya diwarnai oleh rangkuman gagasan yang berhubungan, premis dan teori. (Herman, Hidayat, 2011: 910). Istilah ekologi politik secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan politik. Ekologi di sini difokuskan pada konteks sumberdaya alam. Artinya membahas ekologi berarti membahas sumberdaya alam. Sementara itu, istilah politik pada konteks ini berarti “kekuasaan” (Hikmawan, 2017a).

Oleh karena itu secara sederhana ekologi politik mencermati persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial politik. Senada dengan pengertian sederhana tersebut, Bryant dan Bailey menjelaskan bahwa ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber,

kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Politik lingkungan hidup merupakan kajian yang membahas interaksi antar berbagai elemen sistem (*variable*) di dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik yang menuju terbentuknya *public policy* terhadap masalah-masalah lingkungan. Secara komprehensif dibahas berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik lingkungan, gerakan lingkungan, sistem politik, partai politik dan lingkungan dan proses politik dan lingkungan (Hikmawan, 2017b). Singkatnya, politik lingkungan hidup secara sederhana, meminjai istilah Bryant dan Bailey dinamakan sebagai bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan.

Kerangka pemikiran adalah bagian yang dapat menggambarkan alur pemikiran penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain tentang apa maksud dari penyusunan jurnal ini. Untuk memecahkan suatu masalah yang jelas, sistematis dan terarah diperlukan teori yang mendukung. Untuk itu perlu disusun teori atau model yang digunakan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Dalam karya tulis ini, peneliti menggunakan fokus pada definisi Politik Lingkungan yang dikemukakan oleh Peterson sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian sehingga tidak melenceng. Dimana pada definisi Politik Lingkungan ini menjelaskan bahwa Politik Lingkungan adalah politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tenses yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa Politik Lingkungan tersusun dari masalah Politik yang berhubungan dengan Ekonomi (Hikmawan & Hidayat, 2016), Kelompok dan Lingkungan. Maka pada pembahasan karya tulis ini penulis akan menghubungkan antara Gerakan Sosial, Pemerintah dan Pihak Swasta yang menyusun Politik Lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan sebagai salah satu pengurus tetap pada komunitas Earth Hour Tangerang selama kurun waktu 1 Tahun. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah wilayah gerak Earth Hour yang bersangkutan dengan lingkungan yang ternyata tujuan geraknya bukan hanya menyasar masyarakat, melainkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sektor swasta sebagai pelaku ekonomi bisnis yang berpengaruh langsung dengan masyarakat. Dalam menggambarkan wilayah gerak Earth Hour ini maka akan mendapatkan suatu kondisi dimana pejabat publik serta pelaku bisnis semakin berlombalomba untuk menunjukkan kepeduliannya pada kegiatan lingkungan. Dengan cara ini juga, akan dilihat seberapa jauh *civil society* berpengaruh terhadap *state* dan *market*. Maka apakah gerakan berbasis sukarelawan peduli lingkungan dianggap sangat relevan dalam menjadi kekuatan baru mendapat dukungan dari pemerintah dan swasta yang membutuhkan dukungan dari publik itu sendiri (Hikmawan & Hidayat, 2016).

Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumberdaya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. (Herman, Hidayat, 2011: 910).

Karakteristik yang dimiliki oleh kegiatan penyela matan lingkungan dengan usaha penghematan energi ini adalah kegiatan pertama yang sifatnya bukan lah seperti aksi demonstrasi atau yang sifatnya memprotes akan sesuatu yang merusak lingkungan, namun lebih kepada aksi damai pada lingkungan.

Hasil dan Diskusi

Tiga Pilar Kekuasaan

Terdapat Tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara, yaitu kekuasaan negara (*state*), pasar (*market*), dan *civil society*. Negara memiliki *political power* (kekuasaan politik), pasar memiliki *economic power* (kekuasaan ekonomi/pasar), dan *civil society* memiliki *social power* (kekuatan sosial). Manifestasi dari *social power* (kekuatan sosial) sendiri adalah gerakan sosial. Relasi antara ketiga pilar kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan negara, pasar, dan *civil society* harus berjalan selaras dan seimbang. (Damsar, 147150). Komponen-komponen tersebut adalah negara atau pemerintahan, pasar atau swasta, dan *civil society* atau masyarakat sipil yang biasa di wakikan oleh lembaga swadaya masyarakat terkait. Ketiga komponen ini saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan suatu negara. Ketiga komponen ini juga memiliki peran annya masing-masing. Tetapi sering kali hubungan yang ada diantara keti ganya berupa relasi yang saling menguntungkan atau dapat merugikan. Dimana pola hubungan ketiganya digambarkan pada struktur segitiga yang berada disetiap ujungnya. Sebenarnya dapat dillihat dari pola segitiga ini dimana seharusnya negara menjadi peran diatas dan sebagai penyeimbang antara pasar dan *civil society*. Namun dalam beberapa kasus, seringkali hubungan antara ketiganya berjalan timpang, sehingga yang sering terjadi bukanya sinergisme antara ketiganya melainkan ada elemen yang sangat kuat (dominan) dan sebaliknya ada elemen yang sangat lemah². Kecenderungan praktek dominasi muncul karena menguatnya relasi antara kekuasaan negara dan kekuasaan pasar/korporasi yang banyak meru gikan rakyat.

Masalah lingkungan saat ini menjadi salah satu masalah *urgent* yang cukup disoroti di berbagai negara. Permasalahan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan banyak hal, salah satunya yaitu masalah penguasaan suatu wilayah oleh pihak tertentu contohnya pihak swasta. Penguasaan ini tentunya mempunyai dampak negatif jika pengelolaannya tidak tepat guna baik bagi lingkungan sekitar dan terlebih masyarakat sekitarnya. Pembiaran penguasaan wila yah ini biasanya memang selalu berdampingan dengan dampak pada kerusakan alam, dan dapat dikatakan dimana menutup akses warga sehingga terjadinya privatisasi ruang publik. Melihat pentingnya hubungan negara, pasar, dan *civil society* maka makin banyak negara yang mendorong peningkatan peran ketiga pilar ini sebagai perwujudan dari *goodgovern ance* dimana yang menjadi wacana sebagai sebuah pandangan atau sistem yang dapat mewujudkan sebuah dem okrasi yang murni di Indonesia.

Gambar 1. Segitiga Sinergis Peran antara Negara, Pasar, dan *Civil Society*.

Sumber: Pengantar Sosiologi Politik, 2010: 148. Prof. Dr. Damsar

Dalam teori tiga pilar ini kita mengetahui bahwa terdapat kekuatan yang dapat menggerakkan atau mempengaruhi kehidupan masyarakat. Negara memiliki *political power* (kekuatan politik) melalui intervensi, pasar memiliki *economic power* (kekuatan ekonomi) melalui tangan-tangan tersembunyinya, sedangkan *civil society* mempunyai *social power* (kekuatan sosial) melalui *social movement* (gerakan sosial). Agar kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan bisa dicapai secara optimal, maka prinsip sinergisitas yang dibangun adalah setiap pilar kekuasaan memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian semua tujuan kemanusiaan di atas, baik sebagai individual maupun sebagai kolektivitas. Kontribusi optimal suatu pilar kekuasaan tidak menghambat pilar lain untuk menyumbangkan secara optimal apa yang seharusnya bisa diberikan. Oleh karena itu, setiap pilar kekuasaan tidak boleh memiliki kekuasaan yang mutlak dan kebebasan tanpa batas. Sebab, bila ada suatu pilar kekuasaan yang memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka ia akan menutup pilar yang lain untuk mencapai nilai optimum dari suatu pencapaian. Beberapa kasus di Indonesia memang lebih banyak kasus yang terjadi ketika kekuatan ekonomi dan politik bergabung menjadi suatu kekuasaan yang dominan dan kekuasaan sosial menjadi suatu kekuasaan yang termarginalkan. Di mana kasus ini terkait keuntungan kedua belah pihak saja, karena dianggap gerakan sosial terkadang sebagai batu penghalang keuntungan itu tercapai.

Gerakan Sosial dan Perkembangannya di Indonesia

Gerakan sosial, menurut Singh (2001: 3637), biasanya merupakan mobilisasi untuk menentang Negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata, sebagaimana pemberontakan, dan revolusi. Menurutnya, umumnya gerakan sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka nilai demokratik. Tarrow (1998:45) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan dan penguasa. Disini terdapat empat kata kunci penting, yakni tujuan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi berkelanjutan. Wilson (1973: 911) menekankan “cara-cara yang tidak melembaga”, gerakan ini tidak ditunjukan untuk memperoleh posisi pada sisi kekuasaan, tetapi sebagai tawar-menawar untuk memengaruhi pembuatan kebijakan mengambil solusi yang menguntungkan bagi mereka.

Della Porta dan Diani (1999:1316) menawarkan sedikitnya empat karakteristik utama gerakan sosial, yakni jaringan interaksi informal; perasaan dan solidaritas bersama; konflik sebagai fokus aksi kolektif, dan mengedepankan bentuk-bentuk protes. Dengan kata lain gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama, yang bertujuan memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini pula yang membedakan gerakan sosial yang dilakukan oleh partai politik, kelompok kepentingan, sektesekte agama, protes sesaat, atau koalisi politik sesaat. Pada teori Kebijakan Publik gerakan sosial bisa masuk dalam kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam memainkan peran yang penting untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di suatu Negara. Dewasa ini, kita menyaksikan semakin meluasnya gerakan perlawanan masyarakat atau gerakan sosial dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial secara luas, baik tingkat lokal, nasional, maupun pun global. Di Indonesia, tumbangannya rezim otoritarian Orde Baru Soeharto Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari peran gerakan sosial, yang pada gilirannya menghantarkan bangsa ini ke dalam kondisi yang lebih demokratis (Denny, 2006).

Kejatuhan rezim Soekarno dan Soeharto menggambarkan bagaimana kekuatan

gerakan sosial yang dimiliki oleh civil society mampu mengontrol bahkan menjatuhkan suatu rezim penguasa di Indonesia. Gerakan sosial yang dilakukan oleh civil society untuk menumbangkan rezim orde lama ternyata belum mampu meletakkan fondasi demokrasi dalam Negara. Pada masa orde baru Asosiasi dan organisasi bergantung pada bantuan finansial dan akomodasi dari Negara, sehingga mereka bisa disetir sesuai dengan keinginan pemerintah atau menyetir sesuai dengan keinginan penguasa. Setelah itu tidak jauh berbeda gerakan sosial penumbangan rezim orde lama, gerakan sosial penumbangan rezim orde baru juga di gerakan oleh civil society yang berasal dari berbagai asosiasi dan organisasi (Simamora, Hamid, & Hikmawan, 2019). Pada perkembangannya saat ini Indonesia patut berbangga karena menurut data yang dirilis oleh Global Youth Wellbeing Index yang didirikan bersama mitra dari International Youth Foundation dan Hilton, Indeks yang meneliti tentang tantangan nyata yang dihadapi kaum muda di seluruh dunia yang diharapkan berguna untuk memberikan informasi dalam membuat masa depan dunia cerah bagi generasi berikutnya, menyatakan bahwa Indonesia menempati tingkat pertama (51%) pada Top 25 Countries With Robust Rate of Youth Volunteering yang dirilis pada 13 November 2017 pada halaman Seasia.co Good News from Southeast Asia mengalahkan United States di urutan kedua (46%), dan Australia di urutan ketiga (42%).

“Rich in youth focused data, the index covers overall picture of the political and civic context for each nation, including the existence of a national youth policy, whether youth feel their government cares about their wants and needs, the age for office, and the rate of youth volunteering. Looking at the area of volunteering, the overall results demonstrate that young people are already directly engaged in solving problems their communities face. Extracting the full report of the Index, herewith Seasia provides you with the information on countries that have a very robust rate of youth volunteering. This volunteering rates provide useful insight into the degree of youth engagement and agency in solving community challenges in positive and peaceful ways”.
(<https://seasia.co/2017/11/13/top25countrieswithhighrateofyouthvolunteering>).

Hal ini membuktikan bahwa sukarelawan penggerak gerakan sosial di Indonesia pada perkembangannya saat ini dapat dikatakan sangat meningkat dan tumbuh secara besar. Peran gerakan sosial yang bersifat kolektif atau bersama dapat dikatakan juga sebagai perwujudan budaya gotong royong masyarakat Indonesia yang sudah tertanam dalam kehidupan warga negara dari Indonesia merdeka hingga saat ini.

Lingkungan Sebagai Diskursus Publik

Isu lingkungan telah menjadi pilar penting dalam wacana pembangunan sejak awal 1970an. Bahkan semenjak akhir 1980an soal ini telah menjadi arus utama berbagai kebijakan pembangunan baik tingkat global maupun nasional (Hikmawan & Hidayat, 2016). Salah satu momen penting yang meletakkan lingkungan sebagai tujuan sekaligus kerangka kerja pembangunan bisa ditemukan dalam laporan World Commission for Environment and Development, atau lebih dikenal sebagai komisi Brundtland, yang ditugasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987. Dalam laporan yang berjudul Our Common Future komisi tersebut menggagas konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang diarahkan sebagai agenda politik global dengan menempatkan ‘pembangunan’ dan ‘lingkungan’ dalam satu kesatuan utuh. Menurut komisi ini pembangunan harus mampu mendorong keberlanjutan ekologis dan keadilan global. Dalam laporan ini pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan kebutuhan

hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya” (World Commission for Environment and Development, 1987). Gagasan ini kembali ditegaskan dalam United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil 1992. Urgensi membahas wacana lingkungan dan pembangunan sebenarnya berangkat dari fakta bahwa lingkungan saat ini sedang tidak pada kondisi yang baik-baik saja dalam perbincangan publik (Hikmawan & Hidayat, 2016). Hutan makin rusak, laut dan sungai tercemar, iklim makin panas, ozon berlubang, air sulit didapat, udara kotor dll. Konsep tentang alam, lingkungan, manusia beserta hubungannya yang mendasari pilihan kebijakan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang alamiah tapi selalu dibentuk melalui gagasan, narasi dan perbincangan (Bryant, 1998; Castree & Braun, 2001).

Dikutip dari *National Geographic* Indonesia di laman nationalgeographic.co.id, Tiongkok duduk sebagai Negara penghasil emisi terbesar, lebih dari 10.36 miliar ton. India berada di posisi keempat yang mengeluarkan emisi sebesar 2.4 miliar ton. Sementara itu, Indonesia menghasilkan 2.05 miliar ton emisi, menjadikan Indonesia nomor enam penghasil emisi terbesar. Pemanasan global dan perubahan iklim yang terus menerus memburuk membuat Negara-negara berkumpul membahas tentang isu ini. Dunia dalam hal ini PBB menanggapi isu terkait perubahan iklim secara serius pada konferensi Perubahan Iklim Paris tahun 2015. Sebagai negara yang sudah merasakan bukannya dampak perubahan iklim, di mana 63% Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia pada tahun 2005 berasal dari perubahan penggunaan lahan dan kebakaran gambut. Sementara 19% berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Indonesia berkomitmen pada tahun 2030 dapat mengurangi 29% karbon emisi dengan berbagai upaya sendiri.

Berbagai permasalahan publik yang timbul karena dampak tercemarnya lingkungan memang bukan satu atau dua keluhan saja, tetapi dapat dikatakan memang permasalahan akibat lingkungan semakin hari semakin berkembang. Mulai dari sungai yang dipenuhi sampah yang mengakibatkan banjir yang menyebar pada pertambahan kasus penyakit bahkan penebangan hutan secara besar-besaran yang digunakan untuk lahan perkebunan yang menyebar pada kasus kurangnya sumber air tanah. Melihat perkembangannya saat ini masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara yang tingkat kesadaran pada dampak lingkungannya sudah menuju tahap berkembang. Di mana dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa banyak gerakan sosial yang menuntut pada pemerintah maupun pihak bisnis untuk selalu mementingkan kesejahteraan lingkungan dalam setiap keputusan maupun kebijakan yang hendak diambil. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam memang harus paham kebijakan apa yang seharusnya dilakukan guna memenuhi kebutuhan publik yang bersangkutan dengan lingkungan.

Earth Hour dan Pemerintah

Keberadaan gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari demokrasi dan ruang publik. Usaha untuk merobohkan demokrasi hamper selalu berhubungan dengan usaha untuk meluluhlantakkan ruang lingkup masyarakat sipil. Selanjutnya, mustahil bila membicarakan demokrasi tanpa mengikutsertakan ruang publik. Pelarangan dan partisipasi menimbulkan kepingan bentuk demokrasi. Oleh karenanya, menurut Chandhoke (2007), demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Perlu diperjelas bahwasanya Earth Hour adalah kegiatan yang sifatnya adalah multi stakeholder. Banyak pihak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Dengan banyaknya pihak yang ikut serta dalam acara Earth Hour, tentunya WWF sebagai promotor dari acara ini, melakukan serangkaian Lobbying terhadap pihak yang dianggap memiliki

kapabilitas untuk mensukseskan kegiatan Earth Hour, WWF memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukannya, diantaranya Lobbying terhadap otoritas setempat, terhadap tokoh yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi opini publik. Dalam tabel akan terlihat bagaimana WWF selaku penggerak Earth Hour melakukan Lobbying terhadap berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam suatu Negara

Tabel 1
Lobbying WWF terhadap Negara-Negara dengan bentuk pemerintahan atau birokrasi terpusat

Government Type	State	Years	NGO's	Private	Public Figure	Government
Communist State	Vietnam	2011	WWF Vietnam Local Partner			The People's Committee of Thua Thien Hue Province
	China	2009				Mayor of Shanghai Mayor of Guangzhou
Constitutional Sultanate	Brunei Darussalam	2010				Odessei Alliance
Constitutional Emirate	Kuwait	2009				Kuwaiti Team for Global Warming
Federation with specified powers delegated to the UAE	United Arab Emirates	2011				DEWA (Dubai Electricity and Water Authority)

Sumber: Jenis pemerintahan tiap Negara pada:

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> dan lobbying pertama kali pada: http://earthhour.org/external_modules/map/map/

Tabel 2.
Lobbying WWF terhadap Negara-Negara dengan Tipe pemerintahan Demokrasi dan Republik*

Government Type	State	Years	NGO's	Private	Public Figure	Government
Parliamentary Democracy	Albania	2009	ANEP			
	Aruba	2009	Earth Hour Aruba Community Group			Minister of Social Affairs, Economy and Culture
	Bulgaria	2009	WWF Bulgaria			
	Canada	2008	WWF Canada			Mayor of Toronto
Federal Parliamentary Democracy	Australia	2007	WWF Australia	Leo Burnett Fairfax Media		

	Belgia	2008	WWF Belgia			
Parliamentary Constitutional Monarchy	Lesotho	2011		Khaya Holdings		Minister of Tourism, Environment and Culture
Republic	Chile	2009	WWF Chile Campaign Group			
	Cyprus	2008	Young Cyprus Green			Cyprus Green Party
	Indonesia	2009	WWF Campaign Group		Nugie Charles Bonarr Sirait	Governor of Jakarta
	Sri Lanka	2010		Expolanka Holdings PLC		Ministry of Environment

Sumber: Jenis pemerintahan tiap negara ada pada: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> dan lobbying pertama kali pada: http://earthhour.org/external_modules/map/map/ dan dilakukan perubahan pada data yang diperlukan.

Pada prakteknya di Indonesia hubungan Earth Hour dengan pemerintah dapat dikatakan cukup baik, tetapi juga hubungan tersebut dikondisikan dengan sikap pemerintah daerah yang dapat terbuka atau tidak dengan kegiatan seperti Earth Hour ini. Contohnya pada kegiatan Earth Hour 2018, Kota Bandung adalah salah satu kota yang menggelar aksi Switch off tersukses di Indonesia, hal ini akibat adanya bentuk dorongan dari pemerintah daerah setempat yang mendukung kegiatan dengan mengeluarkan surat himbuan kepada masyarakat. Bukan hanya di Bandung, Pemerintah Kota Makassar juga tidak ketinggalan untuk mendukung dengan melakukan himbuan secara langsung melalui video ajakan kampanye switch off.

Di Indonesia sendiri switch off berpusat di Stadion Gelora Bung Karno, kegiatan ini pun tidak luput dari dukungan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Tapi sangat disayangkan pada pemerintah provinsi Banten sampai pada selebrasi tahun 2018 belum juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan peduli lingkungan Earth Hour ini. Selain dari kepala daerah yang mendukung acara ini, Earth Hour pun memiliki hubungan baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya di Negara berkembang yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi seperti di Indonesia, gerakan sosial mempunyai peran dan fungsi untuk ‘memperkenalkan kepentingan’ warga dengan aktor pembuat atau perumus kebijakan yaitu pemerintah. Sehingga peran gerakan sosial menjadi penekan yang akan memberikan informasi kepada pejabat publik terkait kemungkinan dan akibat yang akan diambil dalam suatu usulan kebijakan formal.

Earth Hour dan Pihak Swasta

Hubungan antara pihak swasta dan gerakan sosial bisa bersifat saling mempengaruhi. Pihak swasta dan gerakan sosial, dalam perspektif liberal, memiliki karakteristik yang sama, yaitu otonom, bebas, dan mandiri. Oleh karena itu, hubungan pihak swasta dengan gerakan sosial saling mengutakan dan saling meneguhkan satu sama lain terhadap keberadaan mereka masing-masing. Namun ketika pasar dipandang terlalu serakah dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan umat manusia, *civil society* melalui gerakan sosial dapat bersifat oposisi terhadap pihak swasta sebagai kekuatan ekonomi. Earth Hour dalam melaksanakan kegiatannya selain bekerja sama dengan pihak pemerintahan, juga bekerjasama dengan pihak swasta. Dalam melakukan Lobbying terhadap pihak swasta, WWF mampu membawa ide bahwasannya Earth Hour sebagai salah satu bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai komitmen atas upaya pelestarian lingkungan dan menunjukkan bahwasannya dengan turut serta dan ambil bagian dalam kegiatan Earth Hour, berarti perusahaan tersebut memiliki komitmen terhadap lingkungan. Pada pagerlaran kegiatan Earth Hour pertama kali di Sydney, WWF sudah melakukan serangkaian *Lobbying* dan kerjasama dengan pihak swasta yakni perusahaan jasa periklanan Leo Burnett dan juga berbagai perusahaan dan toko di pusat kota Sydney. Peranan pihak swasta ini dibutuhkan selain sebagai mitra kerjasama, juga digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana yang akan dipakai dalam malam puncak kegiatan Earth Hour. Cara yang dilakukan WWF untuk menarik perhatian dari berbagai pihak swasta adalah dengan cara mengedepankan opini bahwasannya Earth Hour adalah suatu alternatif CSR dari sebuah perusahaan, selain itu WWF juga mempublikasikan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di situs resmi mereka sehingga “publik akan tahu apa yang anda lakukan”.

Kesimpulan

Sebagai sebuah gerakan sosial, tentunya gerakan Earth Hour dituntut untuk tetap konsisten di dalam menjalankan idealisme utamanya yakni hemat energi penerapan pada kehidupan sehari-hari dan peduli terhadap lingkungan didalam menghadapi kebijakan Negara yang kadang cenderung tak berpihak pada kondisi sosial lingkungan. Gerakan Earth Hour adalah acara yang dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak *audience* oleh karena itu penting dilakukan upaya-upaya persuasif untuk menunjukkan bahwasannya kegiatan ini mudah untuk dilaksanakan, dan dalam penerapannya memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik yang dimiliki oleh kegiatan penyelamatan lingkungan dengan usaha penghematan energi ini adalah kegiatan yang sifatnya bukan seperti aksi demonstrasi atau yang sifatnya memprotes akan sesuatu yang merusak lingkungan, namun lebih kepada aksi damai peduli lingkungan.

Perlu diperjelas, bahwasannya Earth Hour adalah kegiatan yang sifatnya multi *stakeholder* banyak pihak yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini. Dengan banyaknya pihak yang ikut serta dalam acara Earth Hour tentunya banyak serangkaian *Lobbying* terhadap berbagai pihak yang dianggap kapabilitas untuk mensukseskan kegiatan Earth Hour. Dimana Earth Hour memiliki karakteristik tersendiri untuk melakukannya diantaranya yakni *Lobbying* terhadap otoritas setempat, lalu cara yang dilakukan dengan melobi terhadap tokoh yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi opini publik, bekerjasama dengan NGO lain dan mengangkat isu-isu sosial di masyarakat hingga melakukan *lobbying* dengan pihak swasta. Hal ini sangat menjadi catatan penting ketika dalam wilayah gerak Earth Hour yang seharusnya ini, akan timbul beberapa konteks hubungan baru antara Gerakan sosial dengan penggiringan opini publik terhadap suatu isu yang akhirnya hanya akan menguntungkan beberapa pihak dan memicu permasalahan lingkungan yang dipolitikasi baik

dari pihak pemerintah maupun swasta. Permasalahan lingkungan yang menjadi fokus utama gerakan Earth Hour merupakan suatu sarana yang empuk bagi para aktor publik untuk mengambil dukungan baik dalam segi komersil maupun segi tingkat kepercayaan masyarakat. Sarana yang empuk ini juga dimaksudkan ketika kepentingan-kepentingan beberapa pihak menjadi tujuan utama terseleng garanya suatu kegiatan dibandingkan dengan tujuan untuk menjaga keles tarian lingkungan dan menghemat en ergi. Maka dengan ini penulis dapat dengan jelas menyimpulkan bahwa permasalahan lingkungan bukan suatu kendaraan yang dapat dengan mu dahnya digunakan sebagai transportasi atau cara beberapa pihak guna men capai kepentingannya lebih dari itu permasalahan lingkungan merupakan suatu isu yang serius dan penting untuk diperhatikan lebih lanjut baik dari masyarakat, hingga sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Referensi

- Agustino, Leo. 2016. *Dasardasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bakhtiar, Rizal. 2015. *Analisis Meng globalnya Kegiatan Earth Hour Tahun 20172012*. Sura baya: Universitas Airlangga.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hardjono, Susilo. 2008. *Eksistensi Gerakan Greenpeace di Indo nesia*. Yogyakarta. Jurnal Online diakses pada 23 Mei 2018.
- Herman, Hidayat. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Refor masi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hiariej, Eric and Kristian Stokke. 2017. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia in co operation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo.
- Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88–98.
- Hikmawan, M. D., & Hidayat, R. (2016). Depoliticisation of Public Issue : Low Degree of Government ' S Democratic Legitimacy. *Journal of Governance*, 1(1), 23–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1311>
- <https://seasia.co>. 2017. *Top 25 Countries with high rate of youth volunteering*. Pada 24 Mei 2018.
- <https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/> dan lobbying pertama kali pada: http://earthhour.org/external_modules/map/map/.
- <https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/> dan lobbying per tamakali pada: http://earthhour.org/external_modules/map/map/ dan dilakukan pengubahan pada data yang diperlukan

- Jae, Lee See. 2000. *Environmental Movement in Korea and Its Political Empowerment*. Korea: Korean Journal/ Autumn. Jurnal Online diakses pada 25 Mei 2018.
- Male, John Van and Leo d' Anjou. 1998. *Between Old and New: Social Movements and Cul tural Change*. Jurnal Online diakses pada 25 Mei 2018.
- Marwuri, Trilis. 2016. *Komunkasi Persuasif Komunitas Earth Hour dalam Membentuk Perilaku Ramah Lingkungan pada Masyarakat Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: JOM FISIP Bina Widya.
- Rusmanti, Joni. 2012. *Gerakan Sosial, Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelema han*. Universitas Palangka Raya. Buku Online diakses pada 20 Mei 2018.
- Simamora, A. R., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2019). Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan. *International Journal of Demos*, 1(1), 19–37. Retrieved from <http://hk-publishing.id/ijd-demos>
- Ulfa, Ghina Shabrina. 2017. *Efektivi tas Instagram Earth Hour Bo gor Sebagai Media Kampanye Lingkungan*. Bogor: Departement Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia In stitut Pertanian Bogor. Jurnal Online diakses pada 25 Mei 2018.
- Widorini, Wahyu Yuliasuti. 2014. *Strategi Komunikasi Earth Hour dalam Kampanye Gaya Hidup Ramah Lingkungan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- www.wordwildlife.org. Pada 23 Mei 2018
- www.wwf.co.id. Pada 23 Mei 2018.
- www.earthhour.org. Pada 23 Mei 2018.
- www.greenpeace.org. Pada 23 Mei 2018.
- www.walhi.or.id. Pada 23 Mei 2018.